

Kelola TKI, Gerakkan Ekonomi Kelokalan

Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur NTB

Oleh Islahuddin

Ada sekitar 15.913 orang TKI yang berasal dari Lombok Timur tiap tahunnya. Pengelolaan terhadap para TKI tersebut hampir tidak pernah tersentuh oleh Pemerintah Kabupaten. Banyak permasalahan dalam angka-angka tersebut. Terutama sistem peminjaman ongkos pemberangkatan para TKI yang sangat berbahaya, yakni dengan sistem 'riba' (berlipat ganda). Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Lombok Timur yang tidak pernah menepati janji dalam penempatan kerja, kurangnya pemahaman kepemilikan rekening bank pada keluarga TKI, sehingga membuat mereka meminjam rekening pada orang lain tiap penerimaan pengiriman dengan biaya peminjaman dalam kisaran 100-200 ribu rupiah, tidak adanya pemberdayaan dana orientasi kerja berlanjut para TKI paskakepulungannya ke kampung halaman.

Permasalahan

Masa kerja produktif di kabupaten LOTIM dalam kisaran umur 15-64 tahun. Itulah dari hasil riset dinas tenaga kerja kabupaten 2007. 15 tahun umur yang masih muda untuk memulai kerja. Kalau dihitung dalam masa sekolah masa kerja tersebut, rata-rata baru menyelesaikan SMP. Itu perhutungan rata-rata untuk keseluruhan kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan.

Umur memulai kerja tersebut juga terasa dan cukup terlihat di kampung saya. Tepatnya di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Rata-rata orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke tingkatan SMA atau ke perguruan tinggi akan langsung bekerja. Walaupun hanya sebatas membantu orang tua di bidang pertanian, perdagangan, atau bidang yang lainnya. Namun, bidang pertanian yang paling mendominasi.

Bila sudah bosan dengan bidang pertanian—dianggap tidak menghasilkan, hanya sebatas makan—maka pilihan lainnya adalah merantau. Hampir semua pemuda di desa saya semuanya merantau atau menjadi TKI. Kebanyakan merantau hingga ke negeri jiran, seperti Malaysia dan kawasan Timur Tengah (Arab). Malaysia adalah negara tujuan utama, dengan peminat yang lebih banyak bila dibandingkan dengan tujuan kawasan timur tengah.

Adapun pekerjaan yang mereka lakukan di negeri rantau terkadang sebagai kuli perkebunan hingga pekerja bangunan, dan sopir—entah itu sopir taksi ataupun sopir untuk truk barang. Perkebunan adalah sektor yang paling banyak digemari, karena sedikitnya keterampilan pertanian saat bekerja di rumah bisa diandalkan dan tidak

jauh dalam spesialisasi kerjanya.

Merantau adalah pilihan terakhir bagi bagi para pemuda-pemuda tersebut setelah lulus dari bangku SMP dan SMA. Di samping ditambah faktor “provokasi” dari para orang tua, ataupun kejenuhan tinggal di kampung tanpa kerja yang menjanjikan, kecuali hanya bertani dan berkebun. Padahal pemuda saat ini sudah bosan dengan bidang pertanian. Tidak mengherankan bila jumlah TKI yang berasal dari Lombok Timur paling banyak dari kabupaten lainnya di NTB, sebanyak 15.913 orang (data Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kabupaten Lombok Timur 2009)

Bidang pertanian, berkebun, dan berladang rata-rata sudah mereka lakukan sejak kecil hingga lulus SMA. Pertanian kami juga sama dengan daerah lain, yang setiap musim panen selalu ditemui harga murah dan harga mahal saat musim tanam. Para pemuda sudah jenuh dan jengah dengan keadaan yang demikian. Seolah-olah saya merasakan kerja sebagai petani sudah mendapat “kartu kuning”. Pilihan untuk kerja yang terakhir.

Berbeda dengan cerita kekek dan bapak saya, yang pada zamannya sebagai pekerjaan yang membanggakan dengan hasil yang melimpah. Bahkan mereka naik haji dari hasil pertanian. Dan saat ini haji di kampung saya sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Seolah-olah sebagai petani adalah jalan mudah dan kerja yang jujur untuk mencari “ongkos” menuju rumah Tuhan.

Itulah pandangan generasi tua di kampung kami. Amburuknya perekonomian negeri ini juga makin mengikis keyakinan tersebut. Hingga generasi mudanya yang dibesarkan dan disekolahkan dari pertanian sudah tidak punya minat sama sekali, walaupun hanya sekadar meneruskan lahan pertanian warisan keluarga. Lebih baik disewakan atau menyuruh orang lain untuk menggarapnya—dengan sistem bagi hasil. Tragis memang. Hingga menjadi TKI menjadi pilihan.

Kebanyakan dari pemuda-pemuda tersebut tidak memiliki keterampilan yang memadai. Selain modal kebiasaan dalam bertani dan kuli bangunan, ditambah modal nekad saja. Nekad dalam artian, bila ada sanak famili atau tetangga kampung yang sudah bekerja di negeri tujuan tersebut. Setidaknya ada harapan yang terlihat di sana yang berharap untuk bisa membantunya mencarikan kerja.

Adanya Perusahaan Penyalur Jasa TKI (PJTKI) di kabupaten LOTIM, tidak cukup banyak membantu. Dari data yang saya cari dari para mantan TKI, mereka tidak lebih dari calo dalam pembuatan kartu visa, paspor, ataupun surat ijin lainnya. Janji akan jumlah penempatan kerja dengan bidang-bidang tertentu tidak pernah benar sepenuhnya. Padahal, perusahaan itulah yang mendapat keuntungan sebelum pemberangkatan.

Waktu yang tidak sedikit mereka korbankan untuk tinggal dan bekerja di sana. Hasil dari keringat tersebut setidaknya untuk mereka sendiri dan keluarga. Bahkan tidak jarang dari mereka sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, hingga menyekolahkan saudara-saudaranya sampai perguruan tinggi.

Ada yang menyakitkan dari para pemuda yang niat merantau tersebut. Ongkos untuk pergi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika dirata-rata, mereka yang mau ke luar negeri membutuhkan dana sekitar 10-15 juta. Dana tersebut banyak terserap pada calo-calo agen TKI yang juga banyak yang tidak beres. Tidak ada bank pemerintah ataupun koperasi yang sanggup untuk meminjam uang untuk ongkos tersebut. Meminjamkan pada orang yang akan merantau, dianggap beresiko tinggi dan tanpa jaminan yang jelas.

Hingga tidak ada cara lain, berhutang pada personal yang dianggap memiliki uang yang lebih. Biasanya tempat meminjam pada seorang saudagar kaya di kampung dengan sistem riba. Dimana sistem tersebut adalah sistem pinjam dengan kembalian setara jumlah yang dipinjamkan. Misal pinjam 50 juta, maka dana yang dibayarkan harus berjumlah 100 juta.

Benar-benar sangat mengkhawatirkan pola peminjaman ini. Padahal semua orang kampung juga tahu, bahwa itu haram hukumnya dalam Islam. Tapi, mau bagaimana lagi, hanya para rentenir itu saja yang mau dan sanggup memberikan pinjaman dana yang tidak sedikit itu. Mau tidak mau mereka harus menerima kesepakatan sepihak tersebut dengan berat hati.

Sepihak dalam arti, jika tidak sanggup mengembalikan dalam tempo satu tahun, jumlah dana hutang tersebut bisa membengkak tiap bulan. Dengan kisaran bunga "hukuman" telat pelunasan 1 juta tiap bulannya. Hampir saya tidak percaya dengan teman-teman yang berani mengambil hutang yang begitu ganas dan menakutkan tersebut. Bayangkan saja pemuda yang seumuran 18-20 tahun harus menanggung hutang hingga 10-15 juta, hanya sebagai ongkos berangkat merantau sebagai TKI.

Mereka belum bekerja, berapa gaji yang didapatkan tiap bulan, mereka sudah digrogoti dan dihisap. Dan anehnya hal yang semacam ini sudah menjadi hal yang lumrah di kampung saya. Padahal jika dipikir-pikir, hutang yang akan menggeroti masa depan mereka. Para penghutang, hanya menambah untung rentenir tersebut. Namun bagi mereka, dari hutang inilah yang membuatnya giat untuk bekerja. Berkerja dengan giat, agar hutang tersebut segera terlunasi dengan cepat.

Dan benar, rata-rata dari mereka dalam jangka setahun bisa mengembalikan hutang tersebut. Tidak jarang pula yang makin menumpuk. Bagi mereka yang sudah

melunasi hutangnya, uangnya akan dikirimkan pada orang tua mereka untuk di buatka rumah. Hal ini terjadi biasanya pada tahun kedua. Tahun ketiga hingga tahun kelima dianggap untuk cari modal ataupun untuk membiayai kebutuhan keluarga.

Selain itu permasalahan lainnya adalah minimnya pengetahuan mereka akan dunia perbankan. Mereka harus serba membayar dalam banyak hal urusan pengiriman uang. Misalkan saja dalam hal rekening bank. Banyak orang di kampung saya yang menganggap, jika orang memiliki rekening bank adalah hanya mereka yang kaya, mampu menabung tiap bulan dengan jumlah dana maksimal tertentu. Bagi para pemuda rantau tersebut yang biasanya mengirim uang ke kampung, biasanya meminjam rekening pada orang kampung yang di anggap “berpunya” tersebut.

Dalam hal peminjaman rekening inilah, lagi-lagi mereka digrogoti. Bayangkan saja, tiap kali pengiriman, mereka dikenai biaya dalam kisaran 100-200 ribu. Dan mereka tidak tahu uang biaya itu dikemanakan. Dalam pikirannya yang ditahu hanya beres, yang penting pemilik rekening dikasih uang untuk biaya administrasi.

Bisa dibayangkan berapa jumlah uang tersebut jika dikalikan dalam hitungan tahun dan jumlah orang. Sungguh, sebuah pemerasan telah dilakukan pada pemuda-pemuda itu, karena ketidaktahuan mereka akan kepemilikan rekening. Mereka tidak tahu jika telah diperas dengan picik dalam hal ini.

Tapi sudahlah, saya hanya bisa tepekur saja. Teman-teman saya itu mungkin tidak seberuntung saya, yang bisa sekolah tinggi di Jogja yang kebetulan tahu akan hal tersebut. Pernah suatu ketika, saat liburan semester tahun lalu, saya pulang kampung. Saya merencanakan bersama teman-teman yang bersekolah di Ibu kota provinsi (Mataram) akan memberikan pemahaman prihal sistem riba dan kepemilikan rekening terutama yang berkaitan dengan sistem administrasi bank yang banyak salah paham tersebut.

Sesampai di rumah, saya dan teman-teman yang lain malah tidak banyak berkitik akan keadaan tersebut. Malah kami disahuti untuk mengurus sekolah saja, tidak perlu dengan penjelasan yang semacam itu. Jelas tidak akan bisa menyadarkan akan bahaya hutang dengan sistem riba itu. Walau bagaimanapun, setidaknya bisa memberikan pemahaman saja. Hal itu kami lakukan *door to door*. Sedangkan pengarahan tentang sistem kepemilikan rekening bank juga kami jelaskan, bahwa kepemilikan rekening bank tidak harus dibuat dengan uang banyak hingga berjuta-juta. Cukup 500 ribu saja sudah cukup, apalagi itu jika bank nasional milik pemerintah.

Pemahaman tentang rekening ini sudah coba kami informasikan pada orang tua atau keluarga teman-teman saya yang merantau tersebut. Tidak ada tanggapan yang

berarti dari orang-orang yang kami datangi tersebut. Mereka sudah merasa nyaman dengan meminjam rekening dan cukup memberikan uang 200 ribu sebagai administrasi tiap bulan pada si pemilik rekening tersebut.

Begitu sulit memberikan penyadaran pada mereka. Sistem itu masih berlanjut saat saya balik kuliah ke Jogja. Saat saya tanya pada kakak saya di rumah, bahkan si pemilik rekening sudah menjadi “tuan” dari hasil peminjaman rekening pada sekitar 15 pemuda TKI yang mengirim tiap bulannya.

Dari sebuah berita yang di lansir www.sasak.org—sebuah komunitas maya yang fokus pada pemberitaan pulau lombok. Dalam beritanya tertanggal 20 Februari 2009 08:12 yang berjudul: “[Jumlah TKI Dan Remittance Tidak Sebanding](#)”. Berita tersebut menceritakan akan jumlah uang yang masuk dari *Remittance* (angka pengiriman) TKI LOTIM di BNI 46 Mataram justru paling sedikit dari kabupaten lain. Hanya kisaran 2 milyar rupiah, sedangkan kota Mataram dan Lombok Barat sebesar Rp 200 miliar dan untuk Lombok Tengah sebesar Rp. 10 miliar. Padahal jumlah TKI dari LOTIM 40 % dari jumlah total TKI di NTB atau sekitar 15.913 orang.

Berita tersebut saya kira tidak salah. Begitupun dengan apa yang akan jumlah *Remittance* yang dilansir. Ini wajar, karena pemahaman akan kepemilikan rekening pada keluarga TKI masih minim. Tidak mengherankan bila jumlah dana tersebut paling banyak untuk kota Mataram, karena rata-rata peminjaman rekening pada orang-orang atau kerabat dan teman yang tinggal di Mataram. Walaupun demikian Pemerintah kabupaten seperti tidak pernah tahu permasalahan itu, malah meragukan data dari BNI 46 Mataram.

Kembali pada kepemilikan rekening tadi. Itu baru masalah kesadaran akan perlunya kepemilikan rekening bank. Belum lagi dengan dana mereka yang mereka bawa pulang. Padahal jika para pemuda tersebut pulang, tidak sedikit uang yang dibawa. Alasannya sebagai modal atau sebagai bekal hidup selama di rumah. Kisaran dana minimal dari yang saya tahu dari kakak saya sekitar 10 juta/TKI, itu dana minimal yang mereka bawa.

Jumlah dana yang tidak sedikit. Padahal jika saya amati teman-teman saya yang sudah pulang, nyaris mereka tidak bekerja. Mereka hanya mengandalkan dana yang dibawa tersebut. Saat saya tanya pada pada seorang teman yang baru pulang dari Malaysia, “saya tidak bisa menjadikan itu modal, saya tidak bisa melakukan apa-apa jika sudah di rumah,” ungkapnya. Sebuah ungkapan yang membuat saya kaget.

Rata-rata, jika para pemuda itu jika pulang tidak lebih dari menghabiskan uang “sangu” yang dibawa hingga habis. Jika sudah habis, kembali mengulang hutang pada

rentenir dengan bunga yang makin tinggi lagi. Dan kembali lagi untuk merantau. Roda kembali diputar seperti diawal.

Padahal jika dihitung, dalam setahun pemuda yang merantau ada sekitar 10-15 orang dalam satu kampung. Jika dari mereka yang pulang dalam setahun, setengahnya ada sekitar 70 juta yang bakal siap dibawa pulang. Belum lagi uang yang tiap bulan. Jumlah dana yang tidak sedikit, namun selalu habis tatkala mereka pulang.

Solusi

Sistem pemerintahan otonomi daerah saat ini seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan yang bersifat lokal tersebut. Permasalahan yang hanya terjadi dalam tingkatan lokal tertentu dan tidak sama dengan kawasan lain. Tentunya dengan karakteristik dan masyarakat yang beragam pula. Setidaknya dari tingkatan pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten harus bekerja sama dalam menyelesaikannya.

Anehnya dalam kasus ini Pemerintah dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten sudah tahu akan permasalahan ini. Namun tidak ada usaha yang sekiranya membantu bagi para pemuda ini. Baik itu usaha sebelum hingga kepulangannya. Padahal itu terjadi tiap tahun, fenomena yang sangat jelas bisa dilihat dengan kasat mata, tanpa perlu penelitian jika ingin mengetahui di situ ada masalah. Ini bisa diketahui dari laporan dari RT/RW, kepala dusun, di suatu tingkatan desa. Dimana ada semacam data tahunan akan jumlah warganya yang pergi merantau, yang terus *up date*..

Para TKI ini jelas adalah salah satu sumber devisa negara. Sebutan yang begitu sangat klise, hingga bosan dan malas mendengarnya. Mereka tidak pernah dihiraukan dalam tingkatan pemerintahan desa sekalipun, apalagi dalam tingkatan pusat. Padahal ada urusan uang yang di dalam personal TKI ini yang dibutuhkan untuk biaya berangkat. Jika mereka sukses di negeri rantau tersebut, uang akan terus mengalir pada kawasan (desa) itu juga. Jelas itu akan berdampak pada gerak ekonomi daerah yang makin meningkat.

Jika pemerintah, dari tingkatan desa hingga kabupaten tidak bisa pembuatan semacam program sebelum keberangkatan, karena mereka saat itu belum punya uang. Maka buatlah program dan perencanaan pascakepulangan mereka. Atau semacam pemberdayaan. Bayangkan saja, para TKI itu punya uang saat pulang. Setelah itu akan kembali membuang diri untuk membanting tulang, yang bahkan mereka sendiri juga tidak tahu sampai kapan.

Mari kita hitung jumlah TKI dari LOTIM yang sebanyak 15. 913 orang, dengan

asumsi tiap kepala dari mereka mengirim uang tiap bulan sekitar rata-rata 1,5 juta tiap bulan. Maka akan diperoleh dana sekitar Rp. 23. 869 500, 00./perbulan dana yang mengalir di kabupaten LOTIM. Butuh aturan, sistem, dan arah yang jelas bila menginginkan pengelolaan dari setengah dana itu. Tentunya bila Pemkab mau turun tangan secara langsung untuk mengelola para TKI pascakepulungannya.

Saya hanya punya usulan untuk pemerintah, lebih khusus pada Pemkab Lombok Timur. Dengan membuat program khusus pascakepulungan TKI. Misalnya dengan membuat semacam koperasi atau lembaga yang siap menampung dana mereka saat para TKI di negeri rantau. Entah uang tersebut dikelola untuk simpan-pinjam dengan sistem bagi hasil atau sistem yang lainnya ataupun program-program yang berbeda. Bisa juga dengan membuat pelatihan, tanpa biaya bagi mereka yang baru pulang. Mereka diarahkan untuk membuat usaha personal atau gabungan sesama mantan TKI. Dengan begitu mereka ada usaha dan kegiatan saat pulang, bahkan bisa jadi mereka dengan usaha itu tidak membuat mereka untuk kembali merantau.

Jika sukses, dari merekalah yang akan membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda di bawah mereka. Setidaknya dengan sistem ini akan memutus ketergantungan pemuda untuk menjadi TKI, sekaligus untuk pemberdayaan usaha kelokalan yang jarang digarap oleh para putra daerah. Sistem ini bisa sukses jika benar-benar dipacu bahkan ditekankan oleh pemerintah kabupaten dengan sejumlah komponen di bawahnya. Bukan hanya memeriksa darah, akan kecurigaan terhadap penyakit yang mereka bawa dari negeri rantau mereka.

Kabupaten Lombok Timur juga punya potensi selain di bidang pertanian. Pariwisata salah satu yang bisa di andalkan. Ini mengingat kawasan wisata pantai dan alam yang tidak kalah menarik dari daerah lain. Bisa saja para mantan TKI ini atau pemuda yang telah mendapatkan pelatihan di arahkan pada bidang tersebut. Atau bisa juga dengan melihat potensi kemampuan yang ada dari para pemuda-pemuda tersebut dan di arahkan kemana, atau bisa juga melalui dari kesukaan dari para pemuda-pemuda tersebut. Sudah saatnya pemerintah kabupaten juga mulai mendengar semua itu. Karena kerja yang baik, bisa dimulai dari hal-hal yang disukai pelakunya.

Penutup

Setidaknya dari sini, bila ini hal-hal semacam itu bisa dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan akan bisa menggerakkan ekonomi daerah. Ekonomi yang tidak lagi bergantung pada dana sokongan dari para TKI secara terus-menerus. Bahkan, dari pengelolaan dan peberdayaan mereka pemerintah daerah bisa membuat desain bidang ekonomi yang bisa dijalankan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Terutama dalam perencanaan bidang ekonomi yang di anggap sesuai dengan karakter lokal.

Membuat bidang ekonomi yang berkarakter lokal tidak bisa juga dibilang mudah atau serta merta. Butuh rencana dan pelaksanaan yang konsisten. Belum lagi dengan SDM pelakunya yang juga perlu dipikirkan. Inilah tantangan ekonomi yang berbasis kelokalan (kreatif) yang sebenarnya. Bukan hanya sebatas kreatif, tapi juga kreatif yang tidak seragam dengan kawasan (daerah) lain. Sebaiknya memang seperti itu, mengingat Indonesia dengan kesukuan dan pulau yang berbeda. Ada baiknya para pimpinan daerah memikirkan kembali hal itu. Tidak hanya kesukuan, bahasa, dan budaya yang berbeda, tapi juga sumber ekonomi yang memiliki kekhasan tersendiri.

Setidaknya dengan pemahaman dan pengelolaan ekonomi kelokalan yang kreatif akan memberikan dampak semangat nasionalisme yang lain. Bukan hanya tarian dan budaya daerah saja yang membuat para pemuda bangga akan keragaman Indonesia, juga nasionalisme yang berdampak ekonomi yang jelas bagi mereka. Maka kebanggaan akan muncul dengan sendirinya. Hingga pada akhirnya bukan hanya sebatas kebanggaan, juga sekaligus identitas dalam profesi yang menghasilkan di kampung halaman.